

# LAPORAN KINERJA (LKJ)

TRIWULAN I

▶ 2020

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



# KATA PENGANTAR

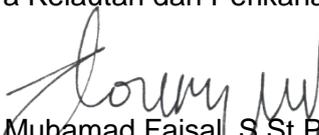


Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Bitung, 9 April 2020  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

  
Donny Muhamad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si  
NIP. 19790502 200212 1 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2020 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Strategis (SS) dan 28 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 99,61. 28 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, 22 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 6 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2020.

Secara umum target kinerja pada Triwulan I tahun 2020 dapat tercapai semuanya, namun terdapat satu IKU yang perlu ditingkatkan kinerjanya pada triwulan berikutnya yaitu IKU8 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dimana capaiannya kinerja dari target 16 Unit hanya tercapai 15 Unit karena terdapat satu buah speedboat yang belum dapat beroperasi karena mengalami kerusakan mesin. Perlu segera dilakukan perbaikan terhadap unit yang mengalami kerusakan, sehingga dapat segera dioperasionalkan untuk mendukung pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung ke depan.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan dan Operasi Armada (2350), Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp54,4 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2020 Rp4,5 miliar atau 8,29%.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2020 kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Anggaran	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Rekomendasi	32
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	11
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2020	14
Tabel 3	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	17
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	18
Tabel 5	Capaian Kegiatan Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites Triwulan I Tahun 2020	20
Tabel 6	Hasil pengawasan pelaku usaha wisata bahari Triwulan I tahun 2020 lingkup Pangkalan Bitung	21
Tabel 7	Hasil pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing Triwulan I tahun 2020 lingkup Pangkalan Bitung	22
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	23
Tabel 9	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Laik Operasional lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	23
Tabel 10	Rincian Capaian Pengawasan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	24
Tabel 11	Rincian Capaian Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	25
Tabel 12	Rincian Capaian Pengawasan Usaha Distribusi Hasil Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	25
Tabel 13	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2020	26
Tabel 14	Persentase Cakupan WPPNRI Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	26
Tabel 15	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa oleh Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2020	27
Tabel 16	Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2020	28
Tabel 17	Capaian Hari Operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020	28
Tabel 18	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2020	31

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang	20

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “good governance”.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2020 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

### 1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
  - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
  - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
  - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
  - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
  - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
  - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
  - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
  - b. Eksploitasi mangrove.
  - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### **1.4. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

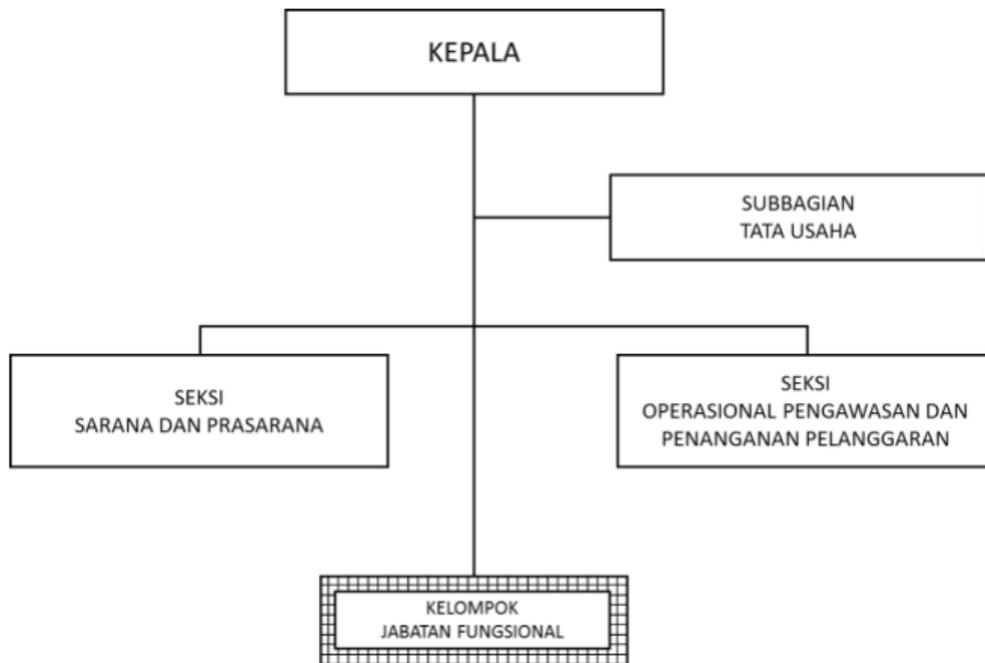
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

- c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran  
Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional  
Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.

- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

## 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2020 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2019-2024.

#### Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

##### 1. Visi

“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

##### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2019-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignty) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

##### 4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan logical model yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan balanced scorecard (BSC)

yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).

Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Di sisi lain, pendekatan balanced scorecard (BSC) adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- a. Stakeholder perspective: “Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”.
- b. Customer perspective: “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”.
- c. Internal Process perspective
  - 1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
  - 2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
- d. Learning and growth perspective
  - 1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
  - 2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
  - 3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
  - 4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel.

## 5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

### a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

### b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

### c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

### d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2019-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2020 yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan dan Operasi Armada;
  - a. Operasional Kapal Pengawas
  - b. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi
  - c. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi
  - d. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
  - e. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a. Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel
  - b. Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
  - a. Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan
  - c. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan
  - d. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
  - a. Kapal Perikanan yang Laik Operasional
  - b. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - c. Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - d. Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP
  - a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
  - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - c. Layanan Perkantoran

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)	55
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,26
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,51

		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	4
		8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300
		10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	360
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	150
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	50
		13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)	40
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	72
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup (%)	82

	19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
	24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)	80
	27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Baik (88)
	28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019 (%)	1

## 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerja* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2020

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 99,61. 28 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, 22 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 6 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kerjanya pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2020. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, sebagaimana yang ada pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2020

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
<b>SS1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat</b>					
IK1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	70	-	-	
<b>SS2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan</b>					
IK2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaku Usaha	55	15	16	100
<b>SS3. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan</b>					
IK3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
<b>SS4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP</b>					
IK4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	1,26	0,36	0,36	100
IK5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	0,51	0,06	0,06	100
IK6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	%	70	70	70	100

<b>SS.5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP</b>					
IK7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	4	4	4	100
IK8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	16	16	15	93,75
<b>SS6. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP</b>					
IK9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	Unit	300	45	45	100
IK10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat	Unit	360	89	89	100
IK11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	150	25	25	100
IK12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	50	3	3	100
IK13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Orang	40	-	-	
<b>SS7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan</b>					
IK14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
IK15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	100	100	100
IK16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	100	100	100
<b>SS8. Tata kelola pemerintahan yang baik</b>					
IK17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	72	-	-	
IK18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	82	65	68,89	100
IK19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	20	20	100
IK20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	27	27	100
IK21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	-	-	
IK22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	25	25	100

IK23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	Unit Kerja	1	-	-	
IK24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	25	25	100
IK25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
IK26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	Indeks	80	80	92,90	100
IK27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai	Baik (88)	60	61,30	100
IK28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019	%	1	-	-	

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 9 April 2020)

Warna	Keterangan
Sangat Baik	100 s.d 120 + Ide Baru
Baik	90 s.d 100
Cukup	70 s.d <90
Kurang	50 s.d <70
Sangat Kurang	<=50
Belum ada penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I tahun 2020, terdapat satu indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu IK8 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dari target 16 Unit speedboat yang siap operasi hanya 15 Unit yang siap operasi. Satu unit speedboat yaitu SP. Dolphin 03 Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masih dalam kondisi rusak.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2019 adalah 103,29% turun menjadi 99,61% pada Triwulan I tahun 2020.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian

kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2019 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

### **CUSTOMER PERSPECTIVE**

#### **Sasaran Strategis (SS1):**

##### ***Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat***

Dalam rangka pencapaian SS1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat di dukung dengan IKU Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang capaiannya baru dapat di ukur pada Triwulan IV tahun 2020. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat ini adalah SS baru yang ditambahkan dalam kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, sehingga SS ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

#### **IKU1 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja baru dapat di ukur pada Triwulan IV tahun 2020.

#### **Sasaran Strategis (SS2):**

##### ***Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan***

Capaian SS2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan di dukung dengan IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan I tahun 2020 adalah 100%.

#### **IKU2 JUMLAH PELAKU USAHA KELAUTAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Target 15 pelaku usaha pada Triwulan I tahun 2020, tercapai 16 pelaku usaha dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TW I 2019	2020	
			Target	Realisasi
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaku Usaha	16	15	16

Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 7 (tujuh) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Jumlah pelaku usaha pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Jumlah Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020

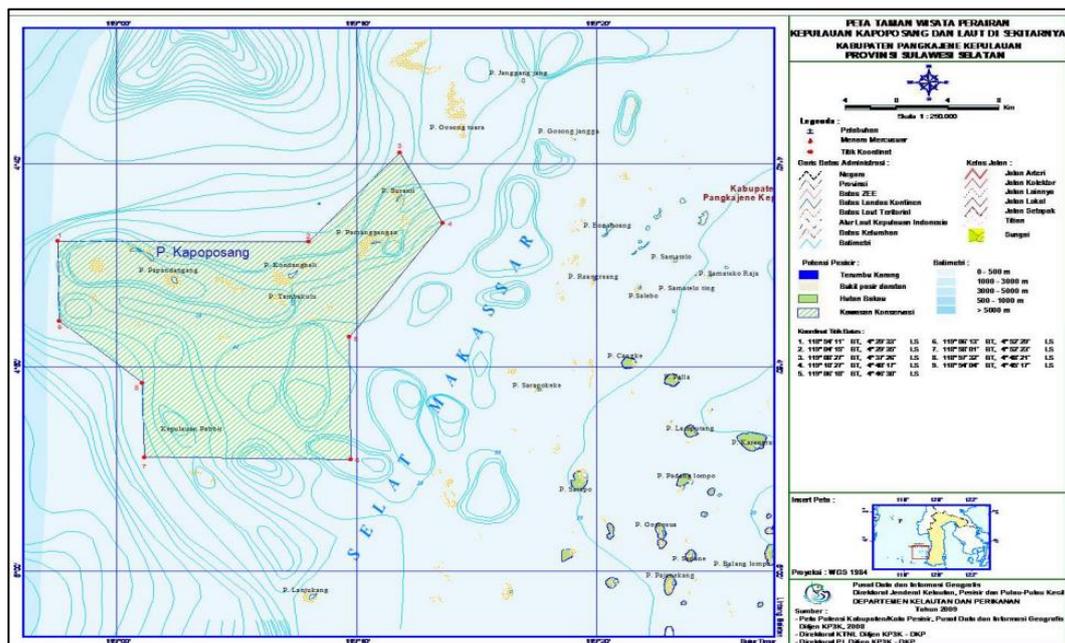
No	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
1.	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	-	-	-
2.	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	3	4	133,3
3.	Jumlah pelaku usaha pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya	3	3	100
4.	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya	-	-	-
5.	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	-	-	-
6.	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	2	2	100
7.	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing	7	7	100
<b>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di Triwulan I tahun 2020, sebagai berikut:

**1. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya**

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP memiliki target 17 (tujuh belas) jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB); 2) Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT); 3) Taman Wisata Perairan Kapoposang (Selawesi Selatan); 4) Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat); 5) Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau); 6) SAP Raja Ampat (Papua Barat); 7) SAP Waigeo (Papua Barat); 8) SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku); 9) Taman Wisata Perairan Padaido (Papua); 10) Taman Wisata Laut Banda (Maluku); 11) Taman Nasional Karimun Jawa ; 12) Taman Nasional Laut Bunaken; 13) Taman Nasional Laut Wakatobi; 14) Taman Nasional Laut Takabonerate; 15) Taman Nasional Teluk Cendrawasih; 16) Taman Nasional Laut Togean; dan 17) Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Tahun 2019, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mendapat target satu kawasan konservasi perairan yaitu Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari: terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu. Dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kegiatan pengawasan kawasan konservasi belum dapat dilaksanakan, sehingga pada Triwulan I tahun 2020 belum ada capaian kegiatan.

## **2. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya**

Telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pengawasan jenis ikan yang dilindungi, dengan rincian sebagai berikut:

- Penanganan ikan paus terdampar di Pesisir Pantai Desa Tolotio Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2020  
Kegiatan penanganan ikan Paus Pilot terdampar yang dilakukan Tim Satwas PSDKP Gorontalo bersama Dinas KP Provinsi Gorontalo, Dinas KP Kab. Bone Bolango, dan Polair Gorontalo dengan cara mengubur bangkai Paus di pesisir Pantai Tolotio namun terlebih dahulu memotong bangkai Paus menjadi 4 bagian untuk memudahkan dalam pelaksanaan. Hasil identifikasi Paus Pilot berjenis kelamin jantan, dengan ukuran: Panjang keseluruhan 4,80 cm, Lebar lingkaran perut 2,40 cm, Lingkaran kepala 180 cm, Berkelamin jantan, Sirip atas lebar 40 cm, panjang 90 cm, Sirip bawah lebar 24 cm, panjang 90 cm, Berat sekitar  $\pm$  2 ton.
- Pengamatan hiu paus di Perairan Laut Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Februari 2020  
Dari hasil pengamatan terdapat 3 (tiga) ekor Hiu Paus yang terpantau muncul ke permukaan laut, dan dalam kondisi baik. Hasil identifikasi Paus Pilot berjenis kelamin

jantan, dengan ukuran: Panjang keseluruhan 800 cm dan Lebar lingkaran perut 90 cm.

- Pelepasliaran penyu hijau di Perairan Laut Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat pada tanggal 21 Maret 2020

Polsus PWP3K Wilker PSDKP Polewali Mandar menerima informasi bahwa ada seekor penyu yang terjebak di saluran air milik warga desa pada saat air laut pasang. Langkah tindaklanjut dari Polsus PWP3K melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap jenis penyu tersebut dan diketahui jenis penyu hijau, selanjutnya bersama dengan warga penyu tersebut dilepasliarkan ke perairan laut. Polsus PWP3K juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait jenis ikan yang dilindungi termasuk didalamnya adalah jenis penyu hijau.

- Penanganan penyu belimbing di Pesisir Pantai Desa Kelurahan Luntio, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Maret 2020

Menindaklanjuti unggahan warga di media sosial, maka tim gabungan (Wilker PSDKP, SKIPM, dan BKSDA Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah) setelah berkoordinasi, bersama sama menuju lokasi di Kelurahan Lontio Baru dan didapati penyu masih berada tidak jauh dari pinggir pantai. Penyu secara tidak sengaja terjaring oleh nelayan bernama Ahmad Pangkatan dengan jenis alat tangkap jaring insang (Gill Net) yang ditebar sepanjang ±300 meter di perairan Selat Peling, namun saat akan mengambil hasil tangkapan ditemukan seekor penyu yang sudah terlilit pada jaring dan sangat sulit untuk dilepaskan. Melihat ukuran penyu yang besar dan ukuran perahu katinting yang kecil yang dapat membahayakan nyawa karena beroperasi seorang diri maka nelayan tersebut mengambil langkah dengan menarik penyu menuju pantai dengan waktu tempuh setengah jam yang mengakibatkan penyu tersebut mati.

### **3. Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha wisata bahari di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di Tasik Ria Resort yang beralamat di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata tirta/diving, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di Murex Dive Resort yang beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata tirta, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di Mapia Resort and Spa yang beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.  
Jenis usaha wisata selam, villa, penyediaan akomodasi, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

#### **4. Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya**

Belum ada capaian kegiatan di Triwulan I tahun 2020.

#### **5. Jumlah Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya**

Belum ada capaian kegiatan di Triwulan I tahun 2020.

#### **6. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan I tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pengawasan pencemaran oleh Wilker PSDKP Palopo yaitu kegiatan Pulbaket dugaan pencemaran di Laut Lampia Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Utara, terkait dengan tumpahnya ore nikel di Dermaga PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Ore nikel tumpah dari atas kapal tongkang Taurus milik PT. Pelayaran Prima Samudera Jasa karena dinding tongkang jebol.
- Pengawasan pencemaran oleh Satwas SDKP Gorontalo di PT. Tenaga Listrik Gorontalo. Hasil pengawasan pelaku usaha telah mengantongi AMDAL/UKL-UPL serta izin lingkungan yang valid dan masih berlaku.

#### **7. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing**

Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan I tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing Triwulan I tahun 2020 lingkup Pangkalan Bitung

No	Pelaku Usaha	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil Pengawasan
1.	Nur Alfiani	Kapal penangkap ikan	Selat Makassar (WPP-NRI 713)	Dokumen perijinan telah habis masa berlaku, tidak

				ditemukan muatan berbahaya
2.	Paraita (Abdullah Affandi)	Kapal penangkap ikan	Selat Makassar (WPP-NRI 713)	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
3.	Cahaya Nabila	Kapal penangkap ikan	Selat Makassar (WPP-NRI 713)	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
4.	Bukit Arafah	Kapal penangkap ikan	Perairan Gorontalo	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
5.	Samannur Cahaya	Kapal penangkap ikan	Perairan Gorontalo	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
6.	Jabal Rahmah	Kapal penangkap ikan	Perairan Gorontalo	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
7.	Nelayan 2017-713	Kapal penangkap ikan	Perairan Gorontalo	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku

### Sasaran Strategis (SS3):

#### Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Capaian SS3. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan di dukung dengan IKU 3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan I tahun 2020 adalah 100%.

#### **IKU3 PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

*Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2019 dan 2020*

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TW I 2019	2020	
			Target	Realisasi
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit Usaha	2757	3053	3053

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Hasil capaian Triwulan I tahun 2020 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:

### 1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan

Pada Triwulan I tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal laik operasi terhadap 3033 Unit kapal perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat ketaatan pelaku usaha sebesar 95,85%.

*Tabel 9. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Laik Operasional lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020*

No	UPT/Satwas/Wilker	Kapal Riksa	Kapal Laik	Kapal Tidak laik
1	Pangkalan PSDKP Bitung	587	571	16
2	Wilker PSDKP Amurang	17	17	-
3	Wilker PSDKP Belang	94	91	3
4	Wilker PSDKP Labua Uki	45	41	4
5	Wilker PSDKP Kema	49	49	-
6	Wilker PSDKP Tumumpa	122	119	3
7	Satwas SDKP Gorontalo Utara	41	41	-
8	Wilker PSDKP Toli-toli	4	4	-
9	Satwas SDKP Gorontalo	119	102	17
10	Wilker PSDKP Molibagu	36	36	-
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	36	36	-
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	20	20	-
13	Wilker PSDKP Boalemo	20	20	-
14	Wilker PSDKP Puhuwato	9	9	-
15	Satwas SDKP Kendari	327	317	10
16	Wilker PSDKP Banggai	17	17	-
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	47	45	2
18	Wilker PSDKP Baubau	60	25	35
19	Wilker PSDKP Kolaka	4	4	-
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	23	23	-
21	Wilker PSDKP Torobulu	4	4	-
22	Wilker PSDKP Wakatobi	44	44	-
23	Satwas SDKP Makassar	72	72	-
24	Wilker PSDKP Bone	175	175	-
25	Wilker PSDKP Palopo	5	5	-
26	Wilker PSDKP Pangkep	20	20	-
27	Satwas SDKP Takalar	146	146	-
28	Wilker PSDKP Bulukumba	90	90	-

29	Wilker PSDKP Selayar	19	19	-
30	Wilker PSDKP Sinjai	636	602	34
31	Satwas SDKP Mamuju	55	55	-
32	Wilker PSDKP Donggala	49	49	-
33	Wilker PSDKP Majene	23	23	-
34	Wilker PSDKP Polman	18	18	-
<b>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya</b>		<b>3033</b>	<b>2907</b>	<b>126</b>

Kapal dinyatakan tidak laik melakukan operasi perikanan antara lain: kapal akan kembali ke pelabuhan pangkalan/asal, kapal tidak melakukan aktifitas perikanan, kapal akan melakukan perbaikan/docking, dan kapal yang masih sementara melakukan pengurusan dokumen.

## **2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 14 (empat belas) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- UPI skala kecil atas nama Wilhelmina Puluhulawa dengan alamat Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, jenis produk ikan roa asap, dinyatakan taat.
- UPI skala kecil atas nama Juhria Giu dengan alamat Desa Katiadala Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, jenis produk daging rajungan beku, dinyatakan taat.
- PT. Sinar Pure Foods International (Skala Besar) dengan alamat Jln Raya Madidir Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung, jenis produk ikan kaleng tuna dan cakalang, dinyatakan taat.
- PT. Tirta Bitung Bahari (Skala Besar) dengan alamat Jln Madidihang, Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk tuna segar dan tuna beku, dinyatakan taat.
- PT. Sari Cakalang (Skala Besar) dengan alamat Madidir Weru Lingkungan IV, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk tuna segar, dinyatakan taat.

- PT. Blue Ocean Grace International (Skala Besar) dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk tuna beku, dinyatakan taat.



- PT. Deho Canning Company (Skala Besar) dengan alamat Jln Raya Madidir RT.21 Lingk. VI, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung, jenis produk tuna kaleng, tuna segar, tuna beku, ikan pelagis beku, dinyatakan taat.
- PT. Sari Tuna Makmur (Skala Besar) dengan alamat Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk tuna segar, dinyatakan taat.
- PT. Sari Malalugis (Skala Besar) dengan alamat Kelurahan Madidir Weru. Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk ikan beku, dinyatakan taat.
- PT. Sinar Ponula Deheto (Skala Besar) dengan alamat Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, jenis produk ikan beku, dinyatakan taat.
- PT. Perikanan Nusantara (Skala besar) dengan alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, jenis produk ikan beku, tuna segar, tuna loin beku, dinyatakan taat.
- PT. Fave Marine Mandiri (Skala Besar) dengan alamat Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, jenis produk ikan beku, dinyatakan taat.
- CV. Mutiara Nusa Timur (Skala Besar) dengan alamat Jln Tomangambari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan, jenis produk kepiting cangkang lunak beku, dinyatakan taat.
- UPI skala kecil Philips dengan alamat Jln Sungai Pareman I No. 32 Palopo, Sulawesi Selatan, jenis produk daging rajungan beku, dinyatakan taat.

### **3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) unit usaha pembudidaya ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Usaha budidaya perorangan atas nama Sakka yang beralamat di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Bergerak di jenis usaha

pembesaran bandeng dan vanamei pada media budidaya air payau, dinyatakan tidak taat karena dalam melakukan usaha budidaya hanya dilengkapi dengan surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mootilango.

- Usaha budidaya perorangan atas nama Abdul Kadir yang beralamat di Desa Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli. Bergerak di jenis usaha pembesaran bandeng pada media budidaya air payau, dinyatakan taat.
- Usaha budidaya perorangan atas nama Kasmawati Sain yang beralamat di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara. Bergerak di jenis usaha pembesaran vanamei pada media budidaya air payau, dinyatakan taat.

#### **4. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan**

Telah dilakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) unit usaha distribusi hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan usaha distribusi di PT. Deho Canning Company yang beralamat di Jln Raya Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara. Usaha distribusi skala besar, jenis produk frozen yellow tuna dengan pemasaran ekspor tujuan Los Angeles Amerika Serikat menggunakan kapal laut/container.
- Pengawasan usaha distribusi di PT. Blue Ocean Grace yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Usaha distribusi skala besar, jenis produk frozen yellow tuna dengan pemasaran ekspor tujuan Vietnam, Miami Amerika Serikat menggunakan kapal laut/container.
- Pengawasan usaha distribusi di PT. Sari Cakalang yang beralamat di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan IV, Kecamatan Madidir Kota Bitung. Usaha distribusi skala besar, jenis produk fresh tuna cut/loin big eye dengan pemasaran ekspor tujuan Thailand menggunakan pesawat terbang.

#### **Sasaran Strategis (SS4):**

##### **Terselenggaranya Pemantauan SDKP**

SS4. Terselenggaranya pemantauan SDKP terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 3) IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP.

#### **IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 dari target 0.36% tercapai 0.36% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

*Tabel 13. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2020*

No	Nama Kapal Pengawas	Total Hari Operasi	Cakupan Teoritis (CT) NM2	Cakupan Aktual (CA) NM2	% Cakupan Aktual
1	KP. Hiu 02	25	43,470	3,912	0,20
2	KP. Hiu 05	25	34,020	3,062	0,16
<b>TOTAL</b>			<b>77,490</b>	<b>6,974</b>	<b>0,36</b>

#### **IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU DARI KEGIATAN ILEGAL FISHING MELALUI OPERASIONAL SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 dari target 0.06% tercapai 0.06% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

*Tabel 14. Persentase Cakupan WPPNRI Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020*

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Total Hari Operasi	Cakupan Wilayah (NM2)	Cakupan Aktual (NM2)	%Cakupan Wilayah
1.	Albacore 01	8	1520	152	0,0079
2.	Dolphin 03	0	0	0	0
3.	Dolphin 19	6	1200	120	0,0062
4.	Dolphin 26	5	1420	142	0,0074
5.	Napoleon 30	0	0	0	0
6.	Napoleon 31	0	0	0	0
7.	Napoleon 56	0	0	0	0
8.	Sea Rider 06	8	1640	164	0,0085
9.	Rubber Boat Bone	0	0	0	0
10.	Rubber Boat Kendari	0	0	0	0
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	5	1000	100	0,0052
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	4	800	80	0,0041
13.	Rubber Boat Pangkep	4	800	80	0,0041
14.	Rubber Boat Selayar	4	880	88	0,0046
15.	Rubber Boat Takalar	0	0	0	0
16.	Rubber Boat Wakatobi	4	1520	152	0,0079
<b>TOTAL</b>				<b>1078</b>	<b>0,06</b>

## **IKU 6 - Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP**

Capaian kinerja IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP pada Triwulan I tahun 2020 dari target 70% tercapai 70% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

### **Sasaran Strategis (SS5):**

#### **Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana**

#### **Pengawasan SDKP**

Capaian SS5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: IKU Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKU Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

### **IKU7 JUMLAH KAPAL PENGAWAS YANG SIAP OPERASI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020 terdapat 4 (empat) kapal pengawas yang siap beroperasi yaitu: KP. Hiu 02, KP Hiu 05, KP. Padaido, dan KP. Todak 01.

### **IKU8 JUMLAH SPEEDBOAT YANG SIAP OPERASI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Untuk mendukung pengawasan SDKP di laut, UPT Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 8 Unit speedboat, 1 Unit RIB, dan 8 Unit rubber boat. Dari 16 Unit tersebut, 1 Unit tidak dapat beroperasi karena masih dalam perbaikan mesin yang rusak, sehingga persentase capaian kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 93,75%.

### **Sasaran Strategis (SS6):**

#### **Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP**

Capaian SS6. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP di dukung dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas; 2) IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat; 3) IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 4) IKU Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 4) IKU Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

### **IKU9 JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA DI LAUT MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS**

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh kapal pengawas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 adalah sebanyak 45 Kapal Ikan Indonesia (KII), dengan rincian sebagai berikut:

- KP. Hiu 02, dengan total capaian hari operasi 25 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 Kapal Ikan Indonesia (KII), dokumen lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar.
- KP. Hiu 05, dengan total capaian hari operasi 25 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 31 Kapal Ikan Indonesia (KII), dokumen lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar.

### **IKU10 JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA DI LAUT MENGGUNAKAN SPEEDBOAT**

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh speedboat/RIB/rubber boat lingkup UPT Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah sebanyak 89 kapal perikanan.

*Tabel 14. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020*

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah KII yang Diperiksa	Keterangan
1.	SP. Albacore 01	11	Dokumen lengkap
2.	SP. Dolphin 03	-	Belum operasi
3.	SP. Dolphin 19	11	Melakukan pemeriksaan 4 (empat) objek SDK
4.	SP. Dolphin 26	12	
5.	SP. Napoleon 30	-	Belum operasi
6.	SP. Napoleon 31	-	Belum operasi
7.	SP. Napoleon 56	-	Belum operasi
8.	Sea Rider 06	8	
9.	Rubber Boat Bone	-	Belum operasi
10.	Rubber Boat Kendari	-	Belum operasi
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	6	Melakukan pemeriksaan 1 (satu) objek SDK
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	14	Melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) lokasi terumbu karang dan 8 (delapan) lokasi mangrove
13.	Rubber Boat Pangkep	3	2 (dua) kapal diduga melakukan kegiatan destructive fishing yaitu menggunakan potasium sianida (buis), kedua kapal tersebut di Ad Hoc ke Kantor Satwas SDKP Makassar di PPN Untia untuk proses lebih lanjut

14.	Rubber Boat Selayar	15	Melakukan pemeriksaan 1 objek SDK (hutan mangrove)
15.	Rubber Boat Takalar	-	Belum operasi
16.	Rubber Boat Wakatobi	9	Melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) objek SDK

## **IKU11 JUMLAH HARI OPERASI KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

*Tabel 16. Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2020*

No	Nama Kapal Pengawas	Total Hari Operasi
1.	KP. Hiu 02	25
2.	KP. Hiu 05	25

## **IKU12 JUMLAH HARI OPERASI SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

*Tabel 17. Capaian Hari Operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2020*

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Total Hari Operasi
1.	Albacore 01	8
2.	Dolphin 03	0
3.	Dolphin 19	6
4.	Dolphin 26	5
5.	Napoleon 30	0
6.	Napoleon 31	0
7.	Napoleon 56	0
8.	Sea Rider 06	8
9.	Rubber Boat Bone	0
10.	Rubber Boat Kendari	0
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	5
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	4
13.	Rubber Boat Pangkep	4
14.	Rubber Boat Selayar	4
15.	Rubber Boat Takalar	0
16.	Rubber Boat Wakatobi	4
<b>Rata-rata Hari Operasi</b>		<b>3</b>

## **IKU13 JUMLAH AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN RUTIN TAHUNAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pengukuran di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

**Sasaran Strategis (SS7):**

**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

Capaian SS7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan di dukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 3) IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

#### **IKU14 PERSENTASE PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN, PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERSANGKA SERTA SAKSI TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menerima limpahan perkara 2 kasus TPKP, di mana berkas penyidikan kedua perkara tersebut telah lengkap (P-21) sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-571/P.4.4/Eku.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n HABIBI BIN SAINUDDIN sudah lengkap dan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-572/P.4.4/Eku.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n GADING BIN KARIM sudah lengkap.

#### **IKU15 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARBUK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Telah dilakukan pengamanan terhadap 1 kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan destructive fishing di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang yaitu KMN. Nur Alisa dalam kondisi baik dan saat ini berada di Kolam labuh PPN Untia Makassar.

#### **IKU16 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah mengamankan 2 orang pelaku kegiatan destructive fishing di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang yaitu a.n Habibi Bin Sainuddin dan Gading Bin Karim.

#### **Sasaran Strategis (SS8):**

##### **Tata kelola pemerintahan yang baik**

Capaian SS8. Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

#### **IKU17 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

#### **IKU18 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Capaian kinerja IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 dari target 65% tercapai 68,89% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

#### **IKU19 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN RB LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Persentase capaian kinerja IKU Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 adalah 100% (Hijau).

#### **IKU20 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Rata-rata pemenuhan layanan dukungan manajemen UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 27 % dengan persentase capaian kinerja adalah 100% (Hijau).

#### **IKU21 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

#### **IKU22 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN PERKANTORAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Rata-rata pemenuhan layanan perkantoran UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 25 % dengan persentase capaian kinerja adalah 100% (Hijau).

#### **IKU23 UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK**

Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

#### **IKU24 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN SPIP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Rata-rata pemenuhan dokumen SPIP UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 25 % dengan persentase capaian kinerja adalah 100% (Hijau).

#### **IKU25 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN AKIP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Persentase pemenuhan dokumen AKIP UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 100%.

### **IKU26 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL**

Capaian IKU ini pada Triwulan I tahun 2020 adalah 92,90% yang merupakan hasil survey kepuasan pengguna layanan SLO Semester II tahun 2019, rencananya untuk penilaian Semester I tahun 2020 akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2020.

### **IKU27 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Nilai IKPA UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 adalah 61,30 dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

### **IKU28 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Nilai capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019 akan diukur pada Triwulan IV tahun 2020.

## **3.3. Akuntabilitas Anggaran**

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 adalah Rp54.435.595.000. dengan persentase realisasi anggaran sebesar 8,29%, dengan rincian

*Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2020*

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Pemantauan dan Operasi Armada (2350)	32.329.525.000	907.774.822	2,81
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351)	488.490.000	55.471.000	11,36
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352)	627.750.000	4.912.200	0,78
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353)	844.537.000	6.206.000	0,73
5	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355)	20.145.293.000	3.537.518.399	17,56
<b>Jumlah</b>		<b>54.435.595.000</b>	<b>4.511.882.421</b>	<b>8,29</b>

# BAB 4

## PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Strategis (SS) dan 28 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2020 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 99,61. 28 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, 22 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 6 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2020. Secara umum target kinerja pada Triwulan I tahun 2020 dapat tercapai semuanya, namun terdapat satu IKU yang perlu ditingkatkan kinerjanya pada triwulan berikutnya yaitu IKU8 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dimana capaiannya kinerja dari target 16 Unit hanya tercapai 15 Unit karena terdapat satu buah speedboat yang belum dapat beroperasi karena mengalami kerusakan mesin.

### 4.2. Rekomendasi

#### Saran

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020, khususnya pada IKU8 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung perlu dilakukan perbaikan terhadap unit yang mengalami kerusakan, sehingga dapat segera dioperasikan untuk mendukung pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

#### Rencana Tindaklanjut

Segera melakukan perbaikan terhadap speedboat yang mengalami kerusakan, sehingga dapat segera dioperasikan untuk mendukung pengawasan SDKP, serta menyusun langkah-langkah percepatan pencapaian kinerjanya kedepan.

# LAMPIRAN



## **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung  
Triwulan I Tahun 2020

# **LAMPIRAN**

